



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 394-402

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Program Kartu Tani di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Doni R Nababan^{1✉}, Zoraya Alfathin Rangkuti²

Universitas Sumatera Utara

Email: doninababan1299@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan subsidi bagi pupuk agar pupuk dapat dijangkau oleh seluruh kalangan petani khususnya petani kalangan menengah ke bawah. Namun kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena ketidakmerataan akan distribusi pupuk bersubsidi baik di tingkat distributor wilayah maupun di tingkat petani. Kartu tani merupakan program yang dapat mengatasi ketidakmerataan distribusi pupuk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan dampak program kartu tani di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi yang didapat, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori Thomas Dye yang meliputi 3 indikator yaitu, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat, dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan, dan dampak kebijakan yang menyebar. Hasil dari penelitian Pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani telah mengatasi masalah pemerataan pupuk yang tidak tepat sasaran. Kemudahan dalam akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dengan kartu tani proses verifikasi KUR menjadi lebih mudah dan namun dalam segi negatif justru mempersulit petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dengan adanya penentuan kios-kios penebusan dalam melakukan penebusan. Bahkan dengan aturan ini masyarakat harus menebus di tempat yang lebih jauh. Pemerintah dimudahkan dalam mendata pertanian yang lebih akurat. Sedangkan pada kios pengecer di Kecamatan Sidikalang penggunaan kartu tani berdampak pada proses penebusan yang menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Kata Kunci: *Dampak, Program, Kartu Tani*

Abstract

The government issued a policy to subsidize fertilizers so that fertilizers can be reached by all farmers, especially middle to lower class farmers. However, the scarcity of subsidized fertilizers occurs due to the uneven distribution of subsidized fertilizers both at the regional distributor level and at the farmer level. The farmer card is a program that can overcome the inequality of fertilizer distribution. This study aims to examine and describe the impact of the farmer card program in Sidikalang District, Dairi Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data and information were collected through interviews and documentation. The data and information obtained were analyzed qualitatively using Thomas Dye's theoretical approach which includes 3 indicators, namely, the impact of policies on public problems and the impact of policies on the people involved, the impact on circumstances or groups outside the target or policy objectives, and the diffuse policy impact. The results of the research Purchasing subsidized fertilizers with farmer cards has overcome the problem of fertilizer distribution that is not on target. Ease of access to Kredit Usaha Rakyat (KUR) because with a tani card the KUR verification process becomes easier and but in a negative aspect it makes it difficult for farmers to redeem subsidized fertilizers with the determination of redemption kiosks in making redemption. Even with this rule, people have to redeem in a farther place. The government is facilitated in recording more accurate agricultural data. Meanwhile, at retailer kiosks in Sidikalang District, the use of farmer cards has an impact on the redemption process which becomes more complicated and takes longer.

Keywords: *Impact, Program, Farmer Card*

PENDAHULUAN

Dilansir dari detik.co.id. 2022 hasil pertanian di Indonesia sangat beragam mulai dari beras, alpukat, kopi, jagung, bawang, cengkih, kakao, kacang-kacangan, kina, sayuran, karet, kayu manis, kedelai, kelapa, kelapa sawit, kentang, ubi jalar, sagu, dan lainnya. Komoditi beras masih menjadi produk pertanian unggulan di Indonesia. Kabupaten Dairi merupakan daerah yang bergantung pada sektor pertanian, Untuk Kabupaten Dairi, pada tahun 2022 sektor pertanian menyumbang sekitar 43,47 % terhadap perekonomian Kabupaten Dairi (Dairikab.go.id).

Kopi arabika menjadi komoditas unggulan kedua sektor pertanian di Kabupaten Dairi setelah padi sawah. Berdasar data statistik Kabupaten Dairi Dalam Angka tahun 2023, di tahun 2022 produksi dan luas areal tanaman kopi arabika 13.824,8 Ha. Luas areal kopi arabika ini hampir mendekati luas areal padi sawah 16.246,50 Ha di Kabupaten Dairi di tahun 2022. Hal ini menunjukkan semangat dan minat masyarakat khususnya petani terhadap budidaya kopi semakin tinggi, komoditi kopi merupakan salah satu unggulan di Kabupaten Dairi.

Namun pertanian di kabupaten Dairi masih memiliki berbagai macam masalah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Anita selaku penyuluh pertanian muda di Dinas Pertanian Kabupaten Dairi yaitu permasalahan pertanian di kabupaten Dairi cukup beragam yakni permasalahan pupuk subsidi dari segi jenis dan kecukupan, teknologi dari alsintan (alat dan mesin pertanian) yang belum memadai, luas lahan yang makin berkurang serta nilai jual hasil pertanian yang tidak sebanding dengan harga hasil pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anita, dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten dairi melalui penyediaan bantuan pupuk subsidi, pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian, dan penyuluhan pertanian mengenai pupuk lengkap dan berimbang, dimana selain penggunaan pupuk kimia, dianjurkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah, serta membuat lahan terpadu pertanian dengan peningkatan infrastruktur pertanian

Pupuk merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pertanian. Sebagai salah satu aspek penting, pupuk justru sulit didapatkan oleh para petani karena harga pupuk yang dijual terbilang mahal dan mengakibatkan tingginya biaya pertanian. Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan subsidi bagi pupuk agar pupuk dapat dijangkau oleh seluruh kalangan petani khususnya petani kalangan menengah ke bawah.

Terdapat berbagai fenomena dan masalah yang terjadi dalam kebijakan subsidi pupuk meliputi keterbatasan anggaran subsidi pupuk, maladministrasi, ketidakpahaman petani terkait peraturan, pembatasan jenis pupuk dan jenis komoditas, terdapat pupuk ilegal, dan adanya ketidaksesuaian substansi peraturan. Anggaran subsidi pupuk Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 34,41 triliun dan secara signifikan menurun setiap tahun hingga tahun 2023 menyentuh angka Rp. 25,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2023).

Moko dkk (2017:9) mengungkapkan permasalahan yang terjadi terkait penyaluran pupuk bersubsidi meliputi kelangkaan pupuk, harga yang fluktuatif, serta penggunaan pupuk oleh petani yang sering kali melebihi dosis anjuran. Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena kebutuhan akan pupuk yang tinggi sedangkan ketersediaan di tingkat pengecer atau penjual serta distributor rendah. Seringkali ketika dibutuhkan persediaan tidak ada dan mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat. Hal tersebut karena ketidakmerataan akan distribusi pupuk bersubsidi baik di tingkat distributor wilayah maupun di tingkat petani.

Program kartu tani merupakan salah cara mengatasi permasalahan pupuk bersubsidi sudah dijelaskan diatas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa "Kartu Tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi".

Dilansir dalam Liputan6.com 12/10/2019 bupati dairi menjelaskan penerapan sistem kartu tani akan memberikan manfaat menjamin, bahwa hanya petani yang terdaftar dan menyusun RDKK aktif yang dapat membeli pupuk di kios pengecer. Penerapan kartu tani ini salah satu pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi serta mempersempit potensi penyimpangan dan secara tidak langsung akan mempromosikan transaksi keuangan non tunai kepada masyarakat petani, sehingga transaksi bisa menjadi lebih praktis dan efisien.

Berdasarkan data kartu tani dan alokasi pupuk kabupaten Dairi tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa data pemilik kartu tani di kabupaten Dairi sudah mencapai 90,80% dengan jumlah kartu yang tercetak 43.086 dengan data petani yang terdaftar di e-RDKK 47.451. Di tahun 2021 terdapat 47.430 petani yang terdaftar di e-RDKK diantaranya dari jumlah itu 42.575 penerima kartu tani. Di tahun 2020 terdapat 37.788 kartu tani yang sudah direalisasikan.

Namun dampak yang dirasakan masyarakat masih jauh dari tujuan utama program, yakni adanya Kredit Usaha rakyat. Dilansir dari Antaranews.com 22/12/ 2022 Sebanyak 12.250 petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sudah memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah atau 26 persen dari jumlah petani pemegang kartu tani yang ada daerah itu.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui masih terdapat masalah dalam program kebijakan kartu tani. Dalam konteks penelitian ini berfokus dampak program kartu tani terhadap petani di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Untuk dapat memahami lebih jauh terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Penelitian Pertama, dengan Judul "Dampak Kebijakan Kartu Tani terhadap Produksi dan Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Jember" Oleh Ahmad Zainudin dan Rudi Wibowo pada tahun 2021. Selanjutnya penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara" Ashari, M. L., & Hariani, D. (2019). Selanjutnya penelitian yang dilakukan Endro Gunawan dan Sahat Pasaribu pada tahun 2020 dengan judul "Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primer yang akan peneliti dapatkan adalah dari metode wawancara. Sedangkan data sekunder akan peneliti dapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menentukan keabsahan data, teknik yang digunakan adalah triangulasi antar peneliti, yakni melibatkan lebih dari satu orang informan dan triangulasi sumber data, yakni dengan pengumpulan data dari beberapa media lain seperti dokumen, arsip dan foto. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga diharapkan data yang dikumpulkan dapat melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang diharapkan lebih transparan serta tepat sasaran, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Dairi membuat perjanjian kerja sama dengan BNI (Bank Negara Indonesia). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor : 520/177/2019 dan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kabanjahe Nomor : SDK/22/267/2019 Tentang Penerapan Kartu Tani Sebagai Alat Penebusan Dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Dairi bertujuan terwujudnya penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan asa 6 (enam) tepat serta pemberian layanan perbankan bagi petani di Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan. Berdasarkan wawancara dengan kepala dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, Pegawai Bidang Sarana dan Prasarana, serta Penyuluh Pertanian Lapangan, dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan studi dokumentasi yang peneliti lakukan dimana pelaksanaan program Kartu Tani ini jelas penyaluran pupuk bersubsidi ini diaturkan dalam Permentan no 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 Kemudian di aturkan dalam Perbub no 20 tahun 2019 dan pada pelaksanaanya diaturkan dalam Peranjian Kerja Sama antara Perintah Kabupaten Dairi no 520/1717/2019 dengan Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kabanjahe Nomor :

SDK/22/267/2019 tentang Penerapan Kartu Tani Sebagai Alat Penebusan Dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Kabupaten Dairi.

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan program kartu tani di Kabupaten Dairi harus di lakukan penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dimana para petani harus tergabung dalam kelompok tani dalam penyusunannya kemudian penyuluh pertanian akan membantu melakukan penyusunan dan entry di setiap kecamatan. Data tersebut diusulkan sebagai rencana data keperluan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi. Pihak kementerian akan melakukan verifikasi dan da mengalokasikan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi, Pihak bank BNI di kabupaten dairi akan menjatah petani dengan kartu tani yang akan digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi.

Selain itu program kartu tani di Kecamatan Sidikalang memberikan dampak kebijakan pada masalah- masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dimana tujuan dari dirumuskannya suatu kebijakan adalah mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut harus dipertimbangkan sejak awal. Ini berarti bahwa pembuat kebijakan harus memikirkan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan lingkungannya, baik secara positif maupun negatif. Tujuan akhir dari merumuskan kebijakan adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan solusi yang efektif terhadap masalah yang dihadapi.

2. Kebijakan mempunyai dampak pada keadaan atau kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil pembahasan melalui hasil wawancara dan hasil penelitian terdahulu serta artikel terkait dapat dilihat bahwa dampak program kartu tani di Kecamatan sidikalang memberikan dampak pada keadaan atau kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan berupa kemudahan dalam akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dengan kartu tani proses verifikasi KUR menjadi lebih mudah. Selain itu dampak program kartu tani di Kecamatan Sidikalang akan memberikan keadaan diluar tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Tujuan program kartu tani di Kabupaten Dairi adalah pemerataan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran kepada petani. Namun dalam hal ini kebijakan juga memiliki dampak keadaan diluar sasaran yang bersifat positif yakni, kemudahan dalam akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

karena dengan kartu tani proses verifikasi KUR menjadi lebih mudah Sedangkan dampaknya dalam segi negatif justru mempersulit petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dengan adanya penentuan kios-kios penebusan melakukan penebusan merasa dipersulit dengan adanya penentuan kios-kios penebusan. Dengan adanya penentuan kios ini masyarakat harus menebus di tempat yang lebih jauh meskipun jarak rumahnya lebih dekat dengan kios yang berbeda kecamatan. Setelah pupuk ditebus dengan kartu tani petani tidak bisa membeli pupuk di kios lain jika di kios yang ditetapkan telah kehabisan stok pupuk bersubsidi

3. Dampak kebijakan yang menyeba

Berdasarkan hasil wawancara dampak yang dirasakan pemerintah adalah Dampak penerapan Kartu Tani bagi pemerintah melibatkan kemudahan dalam pengumpulan dan pemantauan data pertanian yang lebih akurat. Dengan basis data yang terpusat, dapat dengan cepat dan mudah memantau serta memverifikasi informasi petani dan digunakan dalam memproyeksikan pertanian. Data yang dikumpulkan melalui Kartu Tani dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintah dan dapat digunakan dalam memproyeksikan pertanian. Dengan adanya basis data terpusat melalui kartu tani, pemerintah dapat memantau serta memverifikasi informasi terkait aktivitas pertanian petani. Data yang terkumpul melalui kartu tani memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam sistem pemerintah.

Berdasarkan pembahasan dari hasil wawancara dan didukung penelitian terdahulu peneliti menyimpulkan bahwa dampak menyebar program kartu tani di Kecamatan Sidikalang yakni dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok selain mereka yang menjadi sasaran atau tujuan kebijakan. Pemerintah dimudahkan dalam mendata pertanian yang lebih akurat, dengan basis data yang terpusat, dapat dengan cepat dan mudah memantau serta memverifikasi informasi petani. Data yang dikumpulkan melalui kartu tani dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintah dan dapat digunakan dalam memproyeksikan pertanian. Sedangkan pada kios pengecer di Kecamatan Sidikalang penggunaan kartu tani berdampak pada proses penebusan yang menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama dikarenakan menambah proses transfer dalam menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. Oleh hal tersebut waktu yang dibutuhkan dalam menebus pupuk bersubsidi menjadi lama, kendala jaringan juga masih menjadi permasalahan dalam penggunaan kebijakan ini.

SIMPULAN

Pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani telah mengatasi masalah pemerataan pupuk yang tidak tepat sasaran. Kemudahan dalam akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dengan kartu tani proses verifikasi KUR menjadi lebih mudah dan namun dalam segi negatif justru mempersulit petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dengan adanya penentuan kios-kios penebusan dalam melakukan penebusan. Bahkan dengan aturan ini masyarakat harus menebus di tempat yang lebih jauh. Pemerintah memudahkan dalam mendata pertanian yang lebih akurat. Sedangkan pada kios pengecer di Kecamatan Sidikalang penggunaan kartu tani berdampak pada proses penebusan yang menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., & Wibowo, R. 2021. Dampak kebijakan kartu tani terhadap produksi dan efisiensi usahatani padi di Kabupaten Jember. *Jurnal Pangan*, 30(2), 107-116.
- Alisa, I. 2007. Persepsi Petani Terhadap Inovasi Untuk Menggunakan Pupuk Kompos Kotoran Ternak Produk P4S Bumi Lestari Sragen (kasus Petani di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen).
- Arfin, D., Usman, J., & Sudarmi, S. 2022. Eektivitas Program Kartu Tani Pada Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1757-1768.
- Ashari, M. L., & Hariani, D. 2019. Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 574-594.
- Dalimunthe, L. S., Humaizi, H., & Kadir, A. 2021. Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(2), 664-677.
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. 2020. Persepsi Petani dalam Impelentasi Program Kartu Tani untuk Mendukung DIstribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 55-68.
- Moko, K., Suwanto, S. & Utami, B. 2017. Perbedaan Persepsi Petani terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, Vol. 32(1): hal, 9-13.
- Puspita, N. A., & Astuti, R. S. 2020. EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG/79/ADM. PUBLIK/2020 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Rahardjo, Mudjia. 2012. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Tersedia[online]:

<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2015)

Rani, R. D.2018. PENGAWASAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN MELALUI KARTU TANI DI BANK X KC JEMBER

(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. 2016. Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. Reformasi, 6(2).

Sihite, B.2021. Implementasi Program Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.